



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAHAT PATAR LUMBAN GAOL
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN LAYANAN AKADEMIK
3. NHK : 930734

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.205.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/125 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 322 m2 di KAB / KOTA INDRALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **302.700.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S M/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BENSIN Tahun 2020, LAINNYA Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **90.545.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **113.690.433**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.711.935.433

III. HUTANG

Rp. 102.989.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.608.945.833

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.